



PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

Tahun Anggaran 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOJONEGORO**



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. PATTIMURA NO. 01 TELP. (0353) 892019 Fax . 889515
E-mail: dpppakkbojonegoro@gmail.com
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 474/2802/412.209/2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 Nomor 10A); dan
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, sebagaimana tercantum
pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

KEPALA DINAS P3AKB
KABUPATEN BOJONEGORO



HERU SUGIHARTO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690423 200312 1 003

KATA PENGANTAR

Teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dapat terselesaikan.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini memuat Program dan Kegiatan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. Penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan menyediakan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang direncanakan OPD dan memberikan informasi/ gambaran umum tentang pengelolaan Program dan Kegiatan Dinas P3AKB Tahun 2024. Di samping itu sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan kebijakan Bupati pada urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Disadari bahwa Penetapan Perubahan Rencana Kerja ini masih belum memenuhi harapan, karena itu kritik maupun saran kami harapkan untuk perbaikan masa mendatang. Harapan kami Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan tepat.

Kepada para pihak yang telah membantu penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan Allah SWT meridloi usaha kita. Aamiin.

Bojonegoro, 30 Juli 2024

KEPALA DINAS P3AKB
KABUPATEN BOJONEGORO



HERU SUGIHARTO, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19690423 200312 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pengantar	
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	49
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	50
2.4 Review terhadap Penetapan Perubahan RKPD	55
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	72
BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	73
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	73
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.	75
3.3 Program dan Kegiatan	77
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	78
BAB IV : PENUTUP	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun Rencana Kerja PD yang digunakan sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahapan persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD definitif.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan yang matang, tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan baik dalam aspek legal-formal maupun dalam menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah

yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam rangka menggerakkan sistem pemerintahan melalui prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), maka perlu disusun rencana kerja tahunan untuk mengatur program/ kegiatan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro.

Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro melaksanakan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Bahwa pada pasal 14 disebutkan :

- (1) Pemerintah Kabupaten/ Kota bertanggung jawab dalam:
 - a. Menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/ kota; dan
 - b. Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan untuk pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai pasal 16 :

- (1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dinas P3AKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tugas ini berkaitan dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terutama dengan obyek pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan serta menjadi penentu masa depan bangsa dan negara.

Hal ini dapat dilihat keterkaitan jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah, pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki belum menjadikan suatu kekuatan pembangunan, karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan dan anak.

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih baik, perlu ditunjang dengan kebijakan yang sesuai, termasuk kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keberhasilan pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) akan bermuara pada keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pada peningkatan kualitas penduduk dan sumber daya manusia. Era otonomi daerah (UU No. 32 tahun 2004), diharapkan penanganan program P3AKB semakin sistematis, terorganisir, terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dengan prinsip efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan tentang Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016 atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro No 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
22. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/531/KEP/412.013/2021 Tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan

Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024 untuk menyediakan kerangka acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum dan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang akan dilaksanakan di Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Adapun tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh semua pihak di lingkup Dinas P3AKB di Kabupaten Bojonegoro, sehingga terwujud sinergitas antar bidang dalam menjalankan program masing-masing yang bermuara pada pencapaian tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Penetapan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Penetapan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi: 1) Latar Belakang, mengemukakan pengertian rungas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD 2) Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Tugas dan fungsi PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, 3) Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD, 4) Sistematika Penulisan, menguraikan

pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2/2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2023), mengacu APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan terhadap RENSTRA OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/ internasional;
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berisi uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun PD Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten bila sudah dilakukan

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakann dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Berisi rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan mengenai faktor-faktor yang menjasi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dan table Rencana program dan kegiatan

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS P3AKB TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas P3AKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas P3AKB

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro yang ada pada dokumen Renstra 2024-2026 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendukung misi ketiga pada RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan dan misi keempat yaitu Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa. Berikut merupakan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Sasaran yang Mendukung Misi ke 3 RPJMD
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.32	0.44	62.50	Sedang

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dapat dikatakan bahwa realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2022 sebesar 0.44 dan capaiannya sebesar 62.50% dengan katagori “**Sedang**”.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Sasaran yang Mendukung Misi ke 4 RPJMD
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas	Indeks Pemberdayaan Gender	56,51	56,80	100.51%	Sangat tinggi
		Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA)	60%	82%	136.66%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dapat dikatakan bahwa realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022 sebesar 56.80 dan capaiannya sebesar 100.51% dengan katagori “Sangat Tinggi” dan realisasi Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA) sebesar 82.00% dan capaiannya sebesar 136.66% dengan katagori “Sangat Tinggi”.

Sedangkan berikut pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas P3AKB Tahun 2022:

Tabel 2.3
Capaian Renstra Dinas P3AKB Tahun 2022

TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pembangunan

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya komitmen pembangunan responsif gender	Persentase Anggaran Responsif Gender	52.50%	44.34%	84.45%
2	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3.45	2.24	135.07%

3	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 1.000 anak	0,11	0.10	109.09%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	81% (A)	72.66% (BB)	89.70%
		Nilai IKM	3,30	3.43	103.93%
		Persentase penyerapan anggaran Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro	90.00%	86.39%	95.98%

Berdasarkan Hasil Pengukuran pada Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya komitmen pembangunan responsif gender yang diukur melalui 1 (satu) indikator yang memiliki realisasi 44.34% dan persentase capaian sebesar 84.45% sehingga masuk dalam kategori **Tinggi**, tidak tercapainya komitmen pembangunan responsif gender dengan target yang telah ditentukan sebesar 52.50% di tahun 2022 dikarenakan tidak semua OPD yang menjadi sasaran penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) membuat laporan tentang Anggran Responsif Gender.
2. Sasaran meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang diukur melalui 1 (satu) indikator yang memiliki realisasi sebesar 2.24 dan presentase capaian sebesar 135.07% sehingga masuk dalam katagori **Sangat Tinggi**. Tingginya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan seiring dengan meningkatnya kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan yang sudah berjalan dengan baik. Untuk meningkatnya mutu dan kualitas layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan diperlukan unit layanan UPTD PPA di Kabupaten Bojonegoro yang naskah akademiknya telah disusun dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sesuai regulasi dan saat ini masuk dalam proses pengajuan.
3. Sasaran meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang diukur melalui 1 (satu) indikator yang memiliki realisasi 0.10% dan persentase capaian sebesar 109.09% sehingga masuk dalam katagori **Sangat Tinggi**. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak

salah satu penyebabnya yaitu kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor dengan baik yang memiliki tujuan sama yaitu melindungi masa depan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan anak.

4. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah yang diukur melalui 3 (tiga) indikator yang masing masing adalah (1) Nilai SAKIP memiliki realisasi 72.66% (BB) dengan target 81.00% (A) dan persentase capaian sebesar 89.70% sehingga masuk dalam katagori **Tinggi**. Nilai SAKIP ini berdasarkan penilaian dari Inspektorat bawasannya di Tahun 2022 masih di bawah target dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya sebagai berikut: (a) tidak adanya dokumen manajemen resiko, (b) tidak memiliki SOP Reward dan Punishment, dan (c) tidak terdapat revidi dari Bagian Organisasi dalam penyusunan LKjIP tahun 2021, (2) Nilai IKM memiliki realisasi 3.43% dan persentase capaian kinerja sebesar 103.93% sehingga masuk dalam katagori **Sangat Tinggi**. Nilai IKM ini merupakan cerminan dari terlaksananya program dan kegiatan Dinas P3AKB dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (3) Persentase penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki realisasi 86.39% dengan target 90.00% dan persentase capaian kinerja sebesar 95.98% sehingga masuk dalam katagori **Sangat Tinggi**. Ketidaktercapaian realisasi diantaranya sebagai berikut: (1) adanya perubahan regulasi terkait dengan jasa pelayanan IUD dan Implant yang sudah tercover di BPJS Kesehatan sehingga anggaran untuk itu tidak dapat terserap, (2) adanya penurunan jumlah Satgas PPA yang awalnya berjumlah 1425 menjadi 1402 berdasarkan SK Bupati No. 188/KEP/412.209/2022 sehingga mempengaruhi penyerapan biaya operasional disetiap bulannya, (3) Juknis BOKB terkait operasional pendampingan catin, bumil dan nifas bertentangan dengan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bahwa Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan hanya diperuntukkan bagi Non ASN, sedangkan di dalam juknis BOKB honorarium untuk 1 tim dan didalamnya ada ASN (Bidan), (4) status tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan Kecamatan Temayang masih untuk pembangunan RSUD sehingga tidak dapat dibangun untuk Balai Penyuluhan.

TUJUAN 2

: Meningkatkan kualitas Kesehatan melalui pengendalian struktur Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	1.94	1.94	100.00
2	Meningkatnya mCPR	Persentase mCPR	76.76%	77.13%	100.79
3	Menurunnya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persentase Unmetneed	6.8%	6.78%	99.71

Berdasarkan Hasil Pengukuran pada Tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Sasaran Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) yang diukur melalui 1 (satu) indikator yang memiliki realisasi 1.94 dan persentase capaian sebesar 100% sehingga masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) tahun 2022 menunjukkan bahwa program Pendewasaan Usia Perkawinan berhasil dilakukan, hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka pernikahan perempuan >20 tahun di Kabupaten Bojonegoro yang dibuktikan dengan Laporan Pernikahan Berdasarkan Umur Istri tahun 2022 sebesar 13.90% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 14.60%.
2. Sasaran meningkatnya mCPR yang diukur melalui 1 (satu) indikator yang memiliki realisasi sebesar 77.13% dan presentase capaian sebesar 100.79% sehingga masuk dalam katagori **Sangat Tinggi**. Meningkatnya mCPR seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini juga ditunjukkan dengan berhasilnya program keluarga keluarga salah satunya dengan kegiatan pelayanan KB bergerak melalui momentum seperti Hari Kontrasepsi Sedunia, Hari Keluarga Nasional, TMMD dan HUT Bayangkara, dll dapat berjalan dengan optimal.
3. Sasaran Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmetneed*) yang diukur melalui 1 (satu) indikator yang memiliki realisasi 6.78% dan persentase capaian sebesar 99.71% sehingga masuk dalam katagori **Sangat Tinggi**. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmetneed*)

ditahun 2022 merupakan wujud keberhasilan Dinas P3AKB bersama dengan stakeholders terkait dalam melakukan KIE dan konseling kepada masyarakat sehingga adanya tren penurunan tingkat putus pakai/ drop out alat kontrasepsi, terutama pemakaian kontrasepsi non MKJP beralih ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya persentase peserta KB Aktif MKJP ditahun 2022 sebesar 22.11% dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 21.75%.

Tabel 2.4
Anggaran dan Tingkat Realisasi Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU DALAM P APBD 2022 (Rp)	REALISASI KEUANGAN	(%) KEUANGAN
I	Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah	6,968,751,080	6,565,152,342	94.21
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	101,931,045	101,377,900	99.46
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,501,800	22,501,800	100.00
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,801,600	2,801,200	99.99
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2,683,800	2,683,800	100.00
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,137,400	10,132,400	99.95
e	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63,806,445	63,258,700	99.14
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,246,194,746	4,034,318,620	95.01
a	Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	3,850,638,395	3,681,043,970	95.01
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116,968,101	109,380,950	93.51
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	262,364,000	227,714,450	86.79
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,078,800	6,078,750	100.00
e	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3,885,000	3,884,800	99.99
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6,260,450	6,215,700	99.29
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	707,564,400	700,920,000	99.06
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	703,964,400	697,320,000	99.06
b	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,600,000	3,600,000	100.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149,710,000	134,686,533	89.96
a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	115,210,000	100,211,533	86.98
b	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	34,500,000	34,475,000	99.93

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140,776,870	139,719,400	99.25
	a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110,701,500	110,701,500	100.00
	b	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22,722,620	22,717,900	99.98
	c	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,352,750	6,300,000	85.68
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	432,477,661	317,133,501	73.33
	a	Pengadaan Mebel	12,434,800	12,382,000	99.58
	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300,369,205	203,990,000	67.91
	c	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119,673,656	100,761,501	84.20
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796,399,058	750,240,734	94.20
	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174,439,098	147,940,734	84.81
	b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	621,959,960	602,300,000	96.84
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393,697,300	386,755,653	98.24
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206,196,000	199,796,400	96.90
	b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,454,000	30,450,000	99.99
	c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157,047,300	156,509,253	99.66
II		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	225,888,993	184,463,250	81.66
	1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	105,228,600	73,553,300	69.90
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	18,162,200	8,402,200	46.26
	b	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	21,576,400	6,161,100	28.55
	c	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	65,490,000	58,990,000	90.07
	2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	120,660,393	110,909,950	91.92

	a	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	120,660,393	110,909,950	91.92
III		Program Perlindungan Perempuan	2,226,216,600	2,210,573,050	99.30
	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	95,837,300	94,553,750	98.66
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	95,837,300	94,553,750	98.66
	2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24,689,300	15,954,300	64.62
	a	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24,689,300	15,954,300	64.62
	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,105,690,000	2,100,065,000	99.73
	a	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2,105,690,000	2,100,065,000	99.73
IV		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	103,853,887	93,738,887	90.26
	1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103,853,887	93,738,887	90.26
	a	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	103,853,887	103,853,887	90.26
V		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	101,506,750	100,671,900	99.18
	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101,506,750	100,671,900	99.18
	a	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	101,506,750	100,671,900	99.18
VI		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1,225,102,773	1,201,833,024	98.10

	1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	36,410,000	36,350,000	99.84
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	36,410,000	36,350,000	99.84
	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1,188,692,773	1,165,483,024	98.05
	a	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	327,160,000	324,009,846	99.04
	b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131,201,580	126,396,580	96.34
	c	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota	643,652,693	634,318,098	98.55
	d	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86,678,500	80,758,500	93.17
VII		Program Perlindungan Khusus Anak	41,029,150	36,932,450	90.02
	1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41,029,150	36,932,450	90.02
	a	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41,029,150	36,932,450	90.02
VIII		Program Pengendalian Penduduk	964,135,157	720,909,945	74.77
	1	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	11,530,000	11,530,000	100.00
	a	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	11,530,000	11,530,000	100.00

	2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	952,605,157	709,379,945	74.47
	a	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	62,652,500	62,652,500	100.00
	b	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	754,153,557	517,871,400	68.67
	c	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	135,799,100	128,856,045	94.89
IX		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10,385,394,083	9,837,249,342	94.72
	1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,763,967,240	1,681,425,256	95.32
	a	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4,375,000	4,300,000	98.29
	b	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	58,651,240	43,676,900	74.47
	c	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	80,633,000	79,181,900	98.20
	d	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	50,008,000	40,950,000	81.89
	e	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	364,000,000	364,000,000	100.00
	f	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1,166,300,000	1,142,666,456	97.97
	g	Pengendalian Program KKBPK	40,000,000	6,650,000	16.63
	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PKLB)	5,623,091,700	5,622,693,932	99.99
	a	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	18,791,700	18,393,932	97.88
	b	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5,604,300,000	5,604,300,000	100.00
	3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,911,585,143	1,446,380,154	75.66

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

	a	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33,150,000	30,952,250	93.37
	b	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	20,982,250	20,982,200	100.00
	c	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1,617,396,593	1,169,996,600	72.34
	d	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	7,000,000	0	0
	e	Penyediaan Sarana Penunjang KB	161,662,450	153,448,104	94.92
	f	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20,400,000	20,400,000	100.00
	g	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	50,993,850	50,601,000	99.23
	4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	1,086,750,000	1,086,750,000	100.00
	a	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1,086,750,000	1,086,750,000	100.00
X		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5,954,478,793	3,407,794,338	57.23
	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5,936,336,793	3,391,102,338	57.12
	a	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	90,000,000	86,026,250	95.58
	b	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	116,121,225	93,933,500	80.89

c	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	4,300,680,000	2,409,109,615	56.02
d	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1,202,400,000	599,999,623	49.90
e	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	34,190,471	30,390,300	88.89
f	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	149,445,097	130,843,150	87.55
f	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	18,000,000	18,000,000	100.00
g	Advokasi dan Promosi IPK	15,580,000	12,879,900	82.67
h	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	9,920,000	9,920,000	100.00
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	18,142,000	16,692,000	92.01
a	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	18,142,000	16,692,000	92.10
JUMLAH		28,196,357,266	24,359,318,528	86.39

Dari tabel hasil capaian realisasi anggaran tahun 2022 dapat diketahui bahwa sebesar 86.39% penyerapan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di tahun 2022 rendahnya penyerapan anggaran program/ Kegiatan ini dikarenakan banyak faktor yaitu:

1. Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah realisasi keuangan sebesar 94.21%, di dalam program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang salah satu kegiatannya yaitu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan persentase realisasi keuangan sebesar 73.33%. Hal ini disebabkan oleh (1) tidak terserapnya anggaran untuk pengadaan laptop dikarenakan perbedaan harga dengan harga yang ada di e-katalog (harga di e-katalog lebih mahal), sehingga pembelian laptop tidak dapat dilaksanakan, (2) kelebihan anggaran untuk jasa konsultansi, dikarenakan jasa konsultansi harus disesuaikan dengan persentase kebutuhan.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan realisasi keuangan sebesar 81.66%, di dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang masing masing kegiatannya yaitu (1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 69.90%, rendahnya penyerapan kegiatan ini dikarenakan anggaran untuk mendukung Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tidak dapat diserap karena kegiatan APE tidak dilaksanakan berdasarkan surat dari Kementerian PPPA pada tanggal 31 Agustus tahun 2022. (2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 91.92%.
3. Realisasi keuangan Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebesar 90.26%, di dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Keselarasan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 90.26%.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak memiliki realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 99.18%, di dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 99.18%.
5. Realisasi keuangan Program Perlindungan Perempuan sebesar 99.30%, di dalam program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 98.66%, (2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 64.62%, rendahnya penyerapan anggaran di kegiatan ini dikarenakan tidak adanya kasus yang membutuhkan rujukan dan makan minum sasaran di shelter dan (3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 95.80%.

6. Tahun 2022 Program Perlindungan Khusus Anak penyerapan anggaran sebesar 90.02%, di dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 90.02%.
7. Program Pemenuhan Hak Anak di tahun 2022 memiliki penyerapan anggaran sebesar 98.10%, di dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dengan realisasi keuangan sebesar 99.84% dan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi keuangan sebesar 98.05%.
8. Program Pengendalian Penduduk memiliki penyerapan anggaran di tahun 2022 sebesar 74.77%, di dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan realisasi keuangan sebesar 100% dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan sebesar 74.47%, rendahnya penyerapan di kegiatan ini disebabkan adanya sisa honorarium untuk kader pendata di pendataan cakap nikah, karena perbedaan jumlah sasaran yang harus di data dalam perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga secara tidak langsung dapat merubah honor yang diterima oleh kader pendata.
9. Tahun 2022 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) memiliki penyerapan anggaran sebesar 94.72%, di dalam program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu Pelaksanaan, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

dengan realisasi keuangan sebesar 95.32%, Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan realisasi keuangan sebesar 99.99%, Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar 75.66%, rendahnya penyerapan di kegiatan ini dikarenakan adanya jasa pelayanan KB khususnya IUD dan Implant yang bersumber dari DAK NON FISIK tidak dapat diserap karena sudah terbiayai oleh BPJS Kesehatan dan Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB dengan realisasi keuangan sebesar 100.00%.

10. Tahun 2022 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) memiliki penyerapan anggaran sebesar 57.23%, di dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi keuangan sebesar 87.12%, dan Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi keuangan sebesar 92.01%. Rendahnya penyerapan anggaran pada program ini dikarenakan (1) adanya petunjuk teknis untuk anggaran yang bersumber dana dari DAK NON FISIK terkait operasional pendampingan catin, bumil dan nifas bertentangan dengan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menerangkan bahwa honorarium Penyuluhan atau Pendampingan hanya diperuntukkan bagi Non ASN. Tetapi didalam Juknis BOKB honorarium untuk 1 tim (Bidan, Kader PKK dan Kader IMP) didalamnya ada unsur ASNnya (Bidan), (2) Aplikasi Elsimil baru efektif berjalan pada Bulan Maret 2022, sehingga ada sisa anggaran pulsa internet pada Bulan Januari-Februari 2022.

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD Jumlah kegiatan koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
		Jumlah dokmen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah kegiatan koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	5 Kegiatan	62.50%	8 Kegiatan	13 Kegiatan	162.50%
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	33.33%
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	5 Kegiatan	71.43%	7 Kegiatan	12 Kegiatan	171.43%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	0	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	33.33%
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	5 Layanan	4 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100%	5 Layanan	9 Layanan	180.00%
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10 Bulan	83.33%	12 Bulan	10 Bulan	83.33%
		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	0	27 Orang	26 Orang	96.30%	27 Orang	26	32.10
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10 Bulan	83.33%	12 Bulan	10 Bulan	83.33%
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	47 Dokumen	0	10 Dokumen	3 Dokumen	30.00%	27 Dokumen	3 Dokumen	6.38%

2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pemenuhan layanan kebutuhan/ tata usaha gaji, tunjangan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10 Bulan	83.33%	12 Bulan	10 Bulan	83.33%
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	735 Dokumen	0	245 Dokumen	240 Dokumen	97.96%	245 Dokumen	240 Dokumen	32.65%
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun/ keuangan SKPD	15 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	10 Dokumen	200.00%
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48 Laporan	0	16 Laporan	15 Laporan	93.75%	16 Laporan	15 Laporan	31.25%
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah layanan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	3 Kali	2 Kali	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	5 Kali	166.67%
		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	18 Dokumen	0	7 Dokumen	3 Dokumen	42.86%	4 Dokumen	3 Dokumen	16.67%
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah layanan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran	45 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	15 Dokumen	30 Dokumen	200.00%
		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteraan SKPD	79 Laporan	0	30 Laporan	13 Laporan	100%	19 Laporan	13 Laporan	16.46%
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase asset tetap dan tidak tetap milik daerah teradministrasi dengan baik	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.08.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah asset dan tidak tetap milik daerah	37 Orang	37 Orang	36 Orang	37 Orang	102.78%	36 Orang	37 Orang	102.78%
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	172 Dokumen	0	86 Dokumen	86 Dokumen	100%	86 Dokumen	86 Dokumen	50.00%
2.08.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tercatat	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	75 Dokumen	75.00%	100 Dokumen	175 Dokumen	175.00%
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	33.33%
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja pegawai	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dukungan kesehatan pegawai dan jumlah kegiatan pendukung sarana prasarana disiplin pegawai	45 Kegiatan	42 Kegiatan	45 Kegiatan	35 Kegiatan	77.78%	45 Kegiatan	35 Kegiatan	77.78%
		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	8 unit	0	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	50.00%
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	10 Kegiatan	7 Kegiatan	10 Kegiatan	9 Kegiatan	90.00%	10 Kegiatan	16 Kegiatan	160%
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	30 Dokumen	0	10 Dokumen	8 Kegiatan	80.00%	10 Dokumen	8 Kegiatan	40.00%
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan	33 Kegiatan	0	0	0	0	33 Kegiatan	33 Kegiatan	100%
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan logistik untuk operasional instansi	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan logistik untuk operasional instansi	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	4 Jenis	80.00%	5 Jenis	4 Jenis	80.00%
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	14 Paket	0	5 Paket	5 Paket	100%	4 Paket	5 Paket	35.71%
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan bahan cetak dan penggandaan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	50.00%	2 Jenis	1 Jenis	50.00%

		Jumlah paket barang cetakan dan penganggandaan yang disediakan	6 Paket	0	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	0	0
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Media	2 Media	2 Media	0	0	2 Media	2 Media	100%
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0	0	2 Dokumen	100%
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan kedinasan yang terlayani	5 Kunjungan	5 Kunjungan	5 Kunjungan	3 Kunjungan	60.00%	5 Kunjungan	8 Kunjungan	160%
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6 Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	33.33%
2.08.01.2.07	Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang penunjang	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah ketersediaan mebel untuk operasional instansi	8 Jenis	4 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	12 Jenis	150.00%
		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	11.11%
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ketersediaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan instansi	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	9 Jenis	90.00%	10 Jenis	9 Jenis	90.00%
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	36 Unit	0	7 Unit	7 Unit	100%	22 Unit	7 Unit	19.44%
2.08.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pengadaan bangunan atau gedung kantor representatif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Jumlah unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	0	1 Unit	50.00%
2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarpras pendukung gedung kantor yang representatif	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	0	0	1 Jenis	1 Jenis	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnva	1 Unit	0	0	0	0	0	1 Unit	100%

2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Jenis Jasa	4 Jenis Jasa	4 Jenis Jasa	3 Jenis Jasa	75.00%	4 Jenis Jasa	3 Jenis Jasa	75.00%
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	33.33%
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	50.00%	2 Jenis	1 Jenis	50.00%
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	168 Laporan	0	56 Laporan	56 Laporan	100.00%	56 Laporan	56 Laporan	33.33%
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang penunjang milik daerah dilakukan pemeliharaan	100%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6 Jenis	4 Jenis	6 Jenis	5 Jenis	83,33	6 Jenis	9 Jenis	150.00%
		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	307 Unit	0	117 Unit	117 Unit	100%	73 Unit	117 Unit	38.11%
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dilaksanakan pemeliharaan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	0	25 Unit	25 Unit	100%	47 Unit	25 Unit	25.77%
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang membutuhkan pemeliharaan/ rehabilitasi	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	0	0	2 Jenis	2 Jenis	100.00%

		Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diplihara/direhabilitasi	8 Unit	0	3 Unit	1 Unit	33.33%	3 Unit	1 Unit	12.50%
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang melaksanakan pengarusutamaan gender	70%	54%	65%	63.75%	98.08%	65%	63.75%	93.75%
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang responsif gender	57%	55%	55%	55%	100%	55%	55%	96.49%
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota	5 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	20.00%
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00%
		Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsive gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Perangkat Daerah	0	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	100%	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	33.33%
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%
		Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan	120 Perangkat daerah	0	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	100%	40 Perangkat daerah	40 Perangkat Daerah	33.33%

		pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/kota								
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang berpartisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam organisasi kemasyarakatan	56%	53%	55%	52.50%	95.45%	55%	105.5%	188.39%
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	19 kegiatan	7 Kegiatan	16 Kegiatan	7 Kegiatan	70.00%	10 Kegiatan	14 Kegiatan	140.00%
		Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	22 Dokumen	0	10 Dokumen	9 Dokumen	90.00%	10 Dokumen	9 Dokumen	40.91%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	13 Kegiatan	6 Kegiatan	13 Kegiatan	8 Kegiatan	61.54%	13 Kegiatan	14 Kegiatan	107.69%
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	39 Dokumen	0	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	33.33%

2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan kasus rujukan yang ditangani terhadap perempuan korban kekerasan	100 %	100%	100%	98%	98%	100%	98%	98%
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan fasilitas layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas	1 Fasilitas	100%	1 Fasilitas	1 Fasilitas	100.00%
		Jumlah perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	105 Orang	0	35 Orang	30 Orang	85.71%	35 Orang	31 Orang	29.52%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif dalam penanganan perempuan korban kekerasan	100%	94.3%	100%	95%	95%	100%	95%	95%
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang mengikuti bimtek penanganan perempuan korban	1610 Orang	1110 Orang	1110 Orang	1110 Orang	100%	1110 Orang	1110 Orang	68.94%
		Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	4280 Orang	0	1585 Orang	1425 Orang	89.91%	1585 Orang	1425 Orang	33.29%
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kepala rumah tangga perempuan rentan yang memiliki ketrampilan usaha	70%	30%	60%	45%	75%	60%	75%	107.14%
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan rentan yang aktif berusaha dalam meningkatkan kualitas keluarga	50%	35.5%	50%	51%	102%	50%	86.5%	173.00%

2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan perempuan rentan untuk peningkatan kualitas keluarga	6 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200%
		Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	6 Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	33.33%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpenuhi sesuai standar	75%	45%	60%	60%	100%	45%	105%	140%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data gender dan anak	75%	55%	75%	79.28%	105.71%	75%	134.28%	179.04%
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah data yang dihimpun dari OPD/ Instansi terkait	100%	45%	100%	60.00%	60.00%	100%	45%	45.00%
		Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/ kota yang tersedia	3 Dokumen	0	1 Dokumen	2 Dokumen	200.00%	1 Dokumen	2 Dokumen	66.67%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga yang aktif dalam pemenuhan hak anak	90%	70%	80%	80%	100%	80%	80%	88.89%
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak yang aktif	100%	82.14%	82.14%	95%	95%	100%	95%	95.00%
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pertemuan forum anak tentang PHA	5 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00%	2 Kegiatan	4 Kegiatan	80.00%
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	6 Dokumen	0	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	2 Dokumen	1 Dokumen	25.00%

2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang menjalankan fungsinya	100%	75%	85%	87.50%	102.94%	85	87.5%	87.50%
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	11 Lokasi	4 Lokasi	1 Lokasi	3 Lokasi	300.00%	3 Lokasi	7 Lokasi	350.00%
		Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	240 Orang	0	80 Orang	60 Orang	75.00%	80 Orang	60 Orang	25.00%
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pendampingan peningkatan kualitas hidup anak yang di fasilitasi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	6 Dokumen	0	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	2 Dokumen	1 Dokumen	16.67%
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lokasi KIE pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	100%	56%	85.7%	79.00%	92.18%	100%	79%	79.00%
		Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	0	3 Dokumen	7 Dokumen	233.33	3 Dokumen	7 Dokumen	77.78

2.14.02.2.01	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah institusi pendidikan formal/ non formal siaga kependudukan yang terbentuk	2 Sekolah	2 sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah	100%	2 Sekolah	4 Sekolah	200.00%
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non formal	Jumlah orang dari jalur pendidikan formal/ non formal mendapatkan pendidikan kependudukan	60 Orang	30 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	120 Orang	200.00%
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	6 Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	50.00%
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa terdapat cakupan data mikro keluarga	430 Desa	155 Desa	430 Desa	429 Desa	99.77%	430 Desa	584 Desa	135.81%
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data di kampung KB yang terbentuk	15 RDK	4 RDK	15 RDK	10 RDK	66.67%	15 RDK	14 RDK	93.33%
		Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	45 Unit	0	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	50.00%
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah pengelola data yang mendapatkan pembinaan pengolahan data	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	60 Orang	200.00%
		Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	15 Dokumen	0	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	33.33%
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan yang dibuat sesuai juknis dan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	200.00%

		Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	16 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	200.00%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB Aktif MKJP	22 %	21.75%	21.75%	22.11%	101.19%	21.85%	22.11%	100.50%
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kegiatan KIE yang dilaksanakan sesuai standar	75.5%	70%	75%	75.50%	100.67%	75%	145.5%	192.72%
2.14.03.2.01.01	Advokasi program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah advokasi program KKBPK yang dilaksanakan	2 kali	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah dokumen organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	4 Organisasi	0	2 Organisasi	2 Organisasi	100%	2 Organisasi	2 Organisasi	50.00%
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah paket jasa iklan/ reklame KIE Program PPPA dan Bangga Kencana	10 Paket	3 Paket	6 Paket	5 Paket	83.33%	6 Paket	8 Paket	80.00%
		Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 Dokumen	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	33.33%
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah paket media KIE Program Bangga Kencana melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang	8 Media	6 Media	8 Media	5 Media	62.50%	8 Media	11 Media	137.50%

		Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	10 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	50.00%
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	0	6 Dokumen	5 Dokumen	83.33%	6 Dokumen	5 Dokumen	41.67%
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes), dan mini lokakarya (minilok)	Jumlah rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok) yang dilaksanakan	10 kali	0	5 Kali	2 Kali	40.00%	5 Kali	2 Kali	20.00%
		Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi (rakordes), dan mini lokakarya	10 Laporan	0	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah kader/ lini lapangan, Poktan dan masyarakat yang mengikuti KIE Program Bangga Kencana	22232 Orang	10962 Orang	22232 Orang	16361 Orang	73.59%	22232 Orang	27323 Orang	122.90%
		Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan keluarga berencana)	15 Laporan	0	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	50.00%
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah audit kasus stunting yang dilaksanakan	4 Kali	0	0	0	0	2 Kali	0	0

2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah santunan kegagalan KB Metode Operasi yang terlayani	10 Akseptor	7 Akseptor	7 Akseptor	0	0	7 Akseptor	7 Akseptor	70.00%
		Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	14 Laporan	0	7 laporan	0	0	7 Laporan	0	0
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket pengadaan sarana pendukung pelayanan KB yang di laksanakan	3 Paket	2 Paket	3 Paket	2 Paket	66.67%	3	4 Paket	133.33%%
		Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	22 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	22.73%
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	4 Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	50.00%
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan program KB dan Kespro	18673 Akseptor	1250 Akseptor	5400 Akseptor	0	0	0	1250 Akseptor	6.69%
		Terlaksananya promosi dan konseling Kesehatan reproduksi, serta hak hak reproduksi di fasilitas Kesehatan dan kelompok kegiatan	5400 Orang	0	0	0	0	0	0	0
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor KB Implant/ IUD yang tertangani	692 Aksptor	345 Akseptor	602 Akseptor	152 Aseptor	25.21%	692 Akseptor	497 Akseptor	71.82%
		Jumlah laporan dukungan operasional pelayanan KB	30 Laporan	0	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	33.33%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KEUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang ikut kelompok bina ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga	77%	71.6	76.5%	71.87%	93.95%	77%	71.87%	93.34%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bina ketahanan yang aktif	2127 Kelompok	2064 Kelompok	2127 Kelompok	2150 Kelompok	129.29%	2127 Kelompok	2750 Kelompok	129.29%

2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	21 Paket	16 Paket	8 Paket	5 Paket	62.50%	5 Paket	21 Paket	87.50%
		Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21 Unit	0	5 Unit	0	0	5 Unit	0	0
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan pelatihan	200 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	100 Orang	100%
		Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPPKS)	12 Laporan	0	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	33.33%
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	1320 Orang	0	660 Orang	660 Orang	100%	660 Orang	660 Orang	50.00%
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1035 Orang	900 Orang	1035 Orang	430 Orang	41.55%	1035 Orang	1330 Orang	128.50%

		Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPPKS)	1260 Kelompok	0	600 Kelompok	660 Kelompok	110.00%	660 Kelompok	660 Kelompok	52.38%
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	450 Orang	365 Orang	200 Orang	120 Orang	60.00%	200 Orang	485 Orang	107.78%
		Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPPKS)	6 Laporan	0	2 Laporan	4 Laporan	200.00%	2 Laporan	4 Laporan	66.67%
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kader yang mendapatkan sosialisasi orang tua hebat, GenRe dan Kelanjutan	80 Orang	75 Orang	80 Orang	80 Orang	100%	80 Orang	155 Orang	193.75%
		Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orangtua hebat, generasi berencana, kelanjutan serta pengelolaan keuangan keluarga)	9 Laporan	0	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	33.33%
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah kader yang mendapatkan penyuluhan 1000 HPK	250 Kader	0	120 Kader	90 Kader	75%	120 Kader	90 Kader	36.00%

		Hasil dokumen hasil penyediaan dan pengembangan materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	6 Dokumen	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	50.00%
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah kegiatan konsultasi yang dilakukan terkait IPK	20 Kali	1 Kali	4 Kali	3 Kali	75.00%	4 Kali	4 Kali	50.00%
		Jumlah Orang yang mendapatkan advokasi dan promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	450 Orang	0	150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang	150 Orang	33.33%
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah kegiatan koordinasi program BKR, PIK-R, BKB, BKL dan UPPKS	15 Kali	0 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	4 Kali	26.67%
		Jumlah laporan hasil koordinasi evaluasi pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	10 Laporan	0	5 Laporan	4 Laporan	80.00%	4 Laporan	4	40.00%
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok UPPKS yang aktif berusaha	40%	35%	40%	35.10%	87.75%	40%	35.1%	87.75%
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah kelompok UPPKS yang mengikuti pameran	4 Kelompok	3 Kelompok	4 Kelompok	3 Kelompok	75.00%	4 Kelompok	6 Kelompok	150.00%
		Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	9 Laporan	0	3 Laporan	3 Laporan	100.00%	3 Laporan	3 Laporan	33.33%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2022. Pencapaian tersebut secara rinci digambarkan pada tabel T-C.30 berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas P3AKB
Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	Total Fertility Rate (TFR)		Total Fertility Rate (TFR)	1.95	1.94	1.93	1.93	1.94	1.93	1.93	1.93	
2	Persentase mCPR		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	76.51%	76.52%	76.53%	76.53%	77.13%	76.53%	76.53%	76.53	
3	Persentase Unmetneed		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	7%	6.8%	6.6%	6.6%	6.78%	6.6%	6.6%	6.6	
4	Persentase Anggaran Responsif Gender		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50%	52.5%	55%	55%	44.34%	55%	55%	55%	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 per perempuan)		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 per perempuan)	3.50	3.45	3.40	3.40	2.24	3.40	3.40	3.40	
6	Rasio kekerasan terhadap anak (per 1.000 anak)			0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
7	Nilai SAKIP			BB (78%)	A (81%)	A (82%)	A (83%)	BB (72.66%)	A (82%)	A (83%)	A (84%)	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			3.29	3.30	3.32	3.32	3.43	3.32	3.32	3.32	
9	Penyerapan Anggaran Dinas			88.89%	85.00%	85.00%	85.00%	86.39%	85.00%	85.00%	85.00%	
10	Inovasi			1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu – isu strategis merupakan hal yang harus diperhatikan atau mengedepankan dalam perencanaan karena memiliki dampak yang signifikan bagi PD. Dinas P3AKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak bisa berdiri sendiri melainkan memerlukan jejaring mitra kerja baik pemerintah, swasta dan segenap elemen masyarakat.

1) Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis terkait pelayanan PD

Tingkat kinerja pelayanan dan penanganan serta tindaklanjut hal-hal yang kritis, Dinas P3AKB dalam beberapa program dan kegiatan bisa telaksana dan melayani dengan baik meskipun ada program dan kegiatan yang masih belum sesuai harapan. Pada prinsipnya Dinas P3AKB berupaya memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.

Beberapa isu strategis yang merupakan hasil dari FGD menjadi tantangan program Dinas P3AKB antara lain :

Isu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

1. Pengarusutamaan Gender (PUG) belum optimal dan belum menjadi sasaran utama dalam pembangunan yang ditandai dengan masih rendahnya capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di legislatif, Persentase perempuan sebagai tenaga manager, professional dan keluarga;
2. Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas maupun lansia yang ditandai dengan pengumpulan data gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan disemua sektor;
3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO serta belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan;
4. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari capaian kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
5. Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak; dan

6. Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata

Isu Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

1. Pengendalian angka kelahiran total/ *Total Fertility Rate* (TFR);
2. Angka kematian ibu dan anak masih tinggi yang salah satu penyebabnya adalah 4 (empat) T: terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua;
3. Kesertaan ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah;
4. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
5. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) juga masih relatif tinggi walaupun dari tahun ke tahun mengalami penurunan;
6. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (*unmetneed*) dikategorikan masih tinggi; dan
7. Keluarga yang memiliki resiko stunting masih tinggi;

2) Permasalahan dan hambatan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Permasalahan dan hambatan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi tantangan tersendiri dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan tugas dan fungsi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pengarusutamaan Gender (PUG) belum menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten;
- 2) Capaian IDG masih relatif rendah;
- 3) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak relatif masih tinggi;

- 4) Belum optimalnya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak; dan
- 5) Pengumpulan data gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal.

Permasalahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan dan hambatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- 1) Persentase Unmetneed masih relatif tinggi;
- 2) Usia kawin pertama <20 tahun masih tinggi;
- 3) Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Bojonegoro;
- 4) Angka pemakaian Kontrasepsi cara Modern (mCPR) tidak meningkat secara signifikan;
- 5) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*) masih tinggi;
- 6) Angka prevalensi stunting masih tinggi;
- 7) Rendahnya kemampuan bersaing produk kelompok UPPKS; dan
- 8) Jumlah keluarga beresiko stunting masih tinggi.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Ada beberapa tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
3. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender;
4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
5. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki

smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;

6. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara aktif;
7. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
8. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Masih adanya budaya menikah muda di beberapa wilayah;
10. Jumlah pernikahan perempuan dibawah usia 20 tahun masih tinggi;
11. Rendahnya partisipasi laki-laki yang ber-KB;
12. Kurangnya kemampuan bersaing produk kelompok UPPKS;
13. Masih rendahnya persentase Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang aktif dan mandiri;
14. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting
15. Belum optimalnya ketersediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan; dan
16. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB menjadi tantangan dalam pelaksanaan advokasi, komunikasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Selanjutnya ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan dalam mencapai tujuan lembaga, antara lain :

1. Adanya kewenangan yang jelas dan tegas sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 telah membuka peluang bagi Dinas P3AKB untuk meningkatkan kualitas peran dan fungsinya lembaga;

2. Adanya kegiatan momentum eksternal (TMKK, Bhaksos TNI KB-Kes, Kesatuan Gerak PKK-KB Kes dll);
3. Adanya dukungan dan Perjanjian Kerjasama dari lembaga terkait (PKK, Dinas Pendidikan, TNI, POLRI dll);
4. Adanya dukungan dari mitra kerja (Dinkes, Rumah Sakit, Kementerian Agama, TNI, IBI, IDI, Koalisi Kependudukan, KMK dll);
5. Minat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KB cukup tinggi;
6. Adanya program yang sejalan dari OPD lain yang dapat disinergikan dengan program Dinas P3AKB;
7. Adanya peluang untuk peningkatan keadilan gender dalam pelayanan program KB;
8. Adanya peluang memperjuangkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dengan adanya petugas/ pengelola program sampai tingkat lini lapangan menjadikan peluang pelembagaan dan sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan sampai tingkat bawah;
10. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak; dan
11. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tindak lanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- a) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga;
- b) Memperkuat advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi
- c) Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional;

- d) Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia dalam kegiatan Tribina;
- e) Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di daerah;
- f) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu;
- g) Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis IT (Sistem Informasi keluarga/New SIGA, e-Kampung KB, Elsimil dll).
- h) Pembentukan Tim Pendamping Keluarga yang merupakan upaya pendampingan keluarga beresiko stunting sampai tingkat desa dan kelurahan sebagai tindak lanjut dari program percepatan penurunan stunting.
- i) Meningkatkan kapasitas SDM tenaga lini lapangan (IMP, PKB) dalam berbagai kegiatan (seminar, Bimtek dll)
- j) Melaksanakan sosialisasi jaringan kerja perempuan dan masyarakat terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
- k) Melaksanakan sosialisasi berbagai produk hukum tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Trafficking dan Perlindungan Anak;
- l) Meningkatkan kerjasama dengan OPD terkait, dunia usaha dan perbankan untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL);
- m) Peningkatan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2.4 Review terhadap Penetapan Perubahan RKPD

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Penetapan perubahan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama PD: Dinas P3AKB

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Ke t
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata Capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	DP3AKB	100%	7,956,246,643	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	DP3AKB	Rata-Rata Capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7,956,246,643	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan koordinasi dan penyajian dokumen laporan kinerja	DP3AKB	100%	193,655,045	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3AKB	Persentase kegiatan koordinasi dan penyajian dokumen laporan kinerja	100%	193,655,045	
2.08.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	DP3AKB	2 Dokumen	11,138,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DP3AKB	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokume n	11,138,800	
2.08.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	DP3AKB	1 Dokumen	6,395,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DP3AKB	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokume n	6,395,800	
2.08.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DP3AKB	1 Dokumen	7,223,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	DP3AKB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokume n	7,223,000	
2.08.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan	DP3AKB	4 Laporan	14,672,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DP3AKB	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	4 Laporan	14,672,400	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

		ikstiasar realisasi kinerja SKPD						kinerja SKPD			
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	DP3AKB	3 Laporan	154,341,045	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP3AKB	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	154,341,045	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	DP3AKB	5 Layanan	5,247,578,256	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP3AKB	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	5 Layanan	5,247,578,256	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DP3AKB	45 Orang	4,877,706,629	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DP3AKB	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 Orang	4,877,706,629	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	DP3AKB	45 Dokumen	114,539,977	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DP3AKB	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	45 Dokumen	114,539,977	
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	DP3AKB	245 Dokumen	239,107,400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	DP3AKB	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	245 Dokumen	239,107,400	
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3AKB	16 Laporan	6,078,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DP3AKB	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16 Laporan	6,078,800	
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	DP3AKB	4 Dokumen	3,885,000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DP3AKB	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4 Dokumen	3,885,000	
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DP3AKB	19 Laporan	6,260,450	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulan/ Semesteran	DP3AKB	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19 Laporan	6,260,450	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase asset tetap dan tidak tetap milik daerah teradministrasi dengan baik	DP3AKB	100%	3,600,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DP3AKB	Persentase asset tetap dan tidak tetap milik daerah teradministrasi dengan baik	100%	3,600,000	
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	DP3AKB	2 Laporan	3,600,000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	DP3AKB	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	3,600,000	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja pegawai	DP3AKB	100%	39,140,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP3AKB	Persentase peningkatan kinerja pegawai	100%	39,140,000	
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	DP3AKB	10 dokumen	39,140,000	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	DP3AKB	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	10 dokumen	39,140,000	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan logistik untuk operasional instansi	DP3AKB	100%	166,463,828	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DP3AKB	Persentase ketersediaan logistik untuk operasional instansi	100%	166,463,828	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	DP3AKB	5 Paket	132,762,900	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DP3AKB	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	132,762,900	
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	DP3AKB	2 paket	26,365,928	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DP3AKB	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	26,365,928	
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjunga Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	DP3AKB	2 Laporan	7,335,000	Fasilitasi Kunjunga Tamu	DP3AKB	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan	7,335,000	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan kendaraan antar jemput akseptor	DP3AKB	100%	218,075,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DP3AKB	Persentase ketersediaan kendaraan antar jemput akseptor	100%	218,075,000	
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	DP3AKB	12 Paket	84,750,000	Pengadaan Mebel	DP3AKB	Jumlah mebel yang disediakan	12 Paket	84,750,000	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.08.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	DP3AKB	28 unit	133,325,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3AKB	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	28 unit	133,325,000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang penunjang	DP3AKB	100%	1,798,026,425	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP3AKB	Persentase ketersediaan barang penunjang	100%	1,798,026,425	
2.08.01.2.08 .0002	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	DP3AKB	12 Laporan	176,701,846	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DP3AKB	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	176,701,846	
2.08.01.2.08 .0004	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DP3AKB	56 Laporan	1,621,324,579	Penyedia jasa pelayanan umum kantor	DP3AKB	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	56 Laporan	1,621,324,579	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang penunjang milik daerah dilakukan pemeliharaan	DP3AKB	100%	279,708,089	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP3AKB	Persentase barang penunjang milik daerah dilakukan pemeliharaan	100%	279,708,089	
2.08.01.2.09 .0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	DP3AKB	73 unit	212,198,500	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DP3AKB	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	73 unit	212,198,500	
2.08.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	DP3AKB	2 Unit	28,010,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DP3AKB	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit	28,010,000	
2.08.01.2.09 .0011	Pemeliharaan/ Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	DP3AKB	1 Unit	39,499,589	Pemeliharaan/ Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	DP3AKB	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	39,499,589	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase lembaga yang melaksanakan pengarusutamaan gender	Kab Bojonegoro	70%	429,381,274	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab Bojonegoro	Persentase lembaga yang melaksanakan pengarusutamaan gender	70%	429,381,274	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang responsif gender	Kab Bojonegoro	57.50%	328,782,094	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Bojonegoro	Persentase OPD yang responsif gender	57.50%	328,782,094	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bojonegoro	3 Dokumen	11,635,900	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	11,635,900	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bojonegoro	120 Perangkat Daerah	27,174,900	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab Bojonegoro	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Perangkat Daerah	27,174,900	
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bojonegoro	120 Perangkat Daerah	289,971,294	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab Bojonegoro	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan Kabupaten/Kota	120 Perangkat Daerah	289,971,294	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam organisasi kemasyarakatan	Kab Bojonegoro	56.50%	100,599,180	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Bojonegoro	Persentase perempuan yang berpartisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dalam organisasi kemasyarakatan	56.50%	100,599,180	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.08.02.2.02 .0001	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bojonegoro	2 Dokumen	100,599,180	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100,599,180	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Kab Bojonegoro	100%	3,513,833,050	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab Bojonegoro	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	3,513,833,050	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Lembaga yang aktif dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan	Kab Bojonegoro	100%	729,909,750	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Bojonegoro	Persentase Lembaga yang aktif dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan	100%	729,909,750	
2.08.03.2.01 .0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	13 Dokumen	729,909,750	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	13 Dokumen	729,909,750	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase layanan kasus rujukan yang ditangani terhadap perempuan korban kekerasan	Kab Bojonegoro	100%	24,673,300	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Bojonegoro	Persentase layanan kasus rujukan yang ditangani terhadap perempuan korban kekerasan	100%	24,673,300	
2.08.03.2.02 .0001	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Kab Bojonegoro	35 Orang	24,673,300	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	35 Orang	24,673,300	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.08.03.2.03	Penguatan dan pelebagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif dalam penanganan perempuan korban kekerasan	Kab Bojonegoro	100%	2,759,250,000	Penguatan dan pelebagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota	Kab Bojonegoro	Persentase Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif dalam penanganan perempuan korban kekerasan	100%	2,759,250,000	
2.08.03.2.03 .0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	Jumlah sumber daya manusia Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Kab Bojonegoro	1475 orang	2,759,250,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	Kab Bojonegoro	Jumlah sumber daya manusia Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	1475 orang	2,759,250,000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan yang aktif dalam rangka peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Kab Bojonegoro	70.50%	135,165,740	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab Bojonegoro	Persentase lembaga penyedia layanan yang aktif dalam rangka peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	70.50%	135,165,740	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perempuan rentan yang aktif berusaha dalam meningkatkan kualitas keluarga	Kab Bojonegoro	50.50%	135,165,740	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Bojonegoro	Persentase perempuan rentan yang aktif berusaha dalam meningkatkan kualitas keluarga	50.50%	135,165,740	
2.08.04.2.01 .0003	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	6 Laporan	135,165,740	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	6 Laporan	135,165,740	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpenuhi sesuai standar	Kab Bojonegoro	75.50%	92,926,200	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab Bojonegoro	Persentase data gender dan anak yang terpenuhi sesuai standar	75.50%	92,926,200	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan data gender dan anak	Kab Bojonegoro	75.50%	92,926,200	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab Bojonegoro	Persentase penyediaan data gender dan anak	75.50%	92,926,200	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan data gender dan anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Kab Bojonegoro	1 Dokumen	92,926,200	Penyediaan data gender dan anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1 Dokumen	92,926,200	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase lembaga yang aktif dalam pemenuhan hak anak	Kab Bojonegoro	82.50%	1,115,426,123	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Kab Bojonegoro	Persentase lembaga yang aktif dalam pemenuhan hak anak	82.50%	1,115,426,123	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak yang aktif	Kab Bojonegoro	100%	69,970,000	Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bojonegoro	Persentase forum anak yang aktif	100%	69,970,000	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	2 dokumen	19,970,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen	19,970,000	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pemenuhan hak Anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	Kab Bojonegoro	4 Organisasi	50,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pemenuhan hak Anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	4 Organisasi	50,000,000	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.08.06.2.02	Penguatan dan pelebagaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase fasilitas penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang menjalankan fungsinya	Kab Bojonegoro	100%	1,045,456,123	Penguatan dan pelebagaan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Persentase fasilitas penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang menjalankan fungsinya	100%	1,045,456,123	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapat layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	80 Anak	407,483,800	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Jumlah anak yang mendapat layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	80 Anak	407,483,800	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	2 Dokumen	118,989,080	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen	118,989,080	
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	3 Dokumen	368,496,950	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	3 Dokumen	368,496,950	
2.08.06.2.02.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	5 Dokumen	150,486,293	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	5 Dokumen	150,486,293	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Kab Bojonegoro	100%	37,024,150	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab Bojonegoro	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	37,024,150	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.08.07.2.02	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase layanan kasus rujukan yang ditangani terhadap anak korban kekerasan	Kab Bojonegoro	100%	37,024,150	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Persentase layanan kasus rujukan yang ditangani terhadap anak korban kekerasan	100%	37,024,150	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	35 Anak	37,024,150	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	35 Anak	37,024,150	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase desa dan institusi pendidikan formal/ non formal siaga kependudukan aktif dalam kegiatan pengendalian penduduk	Kab Bojonegoro	100%	671,294,700	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab Bojonegoro	Persentase desa dan institusi pendidikan formal/ non formal siaga kependudukan aktif dalam kegiatan pengendalian penduduk	100%	671,294,700	
2.14.02.2.01	Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah institusi Pendidikan formal/non formal siaga kependudukan yang terbentuk	Kab Bojonegoro	2 sekolah	11,530,000	Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Kab Bojonegoro	Jumlah institusi Pendidikan formal/non formal siaga kependudukan yang terbentuk	2 sekolah	11,530,000	
2.14.02.2.01.0019	Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kab Bojonegoro	2 Laporan	11,530,000	Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	2 Laporan	11,530,000	
2.14.02.2.02	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah desa terdapat cakupan data mikro keluarga	Kab Bojonegoro	430 desa	659,764,700	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Kab Bojonegoro	Jumlah desa terdapat cakupan data mikro keluarga	430 desa	659,764,700	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Kab Bojonegoro	-	-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	-	-	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan data dan informasi keluarga	jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	Kab Bojonegoro	12 Dokumen	1,409,100	Penyediaan data dan informasi keluarga	Kab Bojonegoro	jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	12 Dokumen	1,409,100	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Kab Bojonegoro	8 Laporan	298,200,000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab Bojonegoro	Jumlah Laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	8 Laporan	298,200,000	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Kab Bojonegoro	12 Dokumen	297,503,100	Pengolahan dan Pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 Dokumen	297,503,100	
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah data kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di sektor lain yang dibentuk	Kab Bojonegoro	15 RDK	62,652,500	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah data kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kab Bojonegoro	Jumlah rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di sektor lain yang dibentuk	15 RDK	62,652,500	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	Kab Bojonegoro	22.05%	11,616,447,083	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab Bojonegoro	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	22.05%	11,616,447,083	
		Persentase Peserta KB Baru		100%				Persentase Peserta KB	100%		

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kegiatan KIE yang dilaksanakan sesuai standar	Kab Bojonegoro	76.00%	1,599,071,240	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab Bojonegoro	Persentase kegiatan KIE yang dilaksanakan sesuai standar	76.00%	1,599,071,240	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian program KKBPK	Kab Bojonegoro	2 Laporan	140,000,000	Pengendalian Program KKBPK	Kab Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian program KKBPK	2 Laporan	140,000,000	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, Keluarga Berencana)	Kab Bojonegoro	5 Laporan	617,500,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab Bojonegoro	Jumlah kader/ lini lapangan dan masyarakat yang mengikuti KIE Program Bangsa Kencana	5 Laporan	617,500,000	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab Bojonegoro	5 Laporan	420,000,000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan mekanisme operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 Laporan	420,000,000	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

2.14.03.2.01 .0012	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab Bojonegoro	6 Dokumen	100,000,000	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen	100,000,000	
2.14.03.2.01 .0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal	Kab Bojonegoro	4 Dokumen	86,571,240	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai kearifan budaya lokal	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal	4 Dokumen	86,571,240	
2.14.03.2.01 .0014	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab Bojonegoro	4 Organisasi	235,000,000	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab Bojonegoro	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	235,000,000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader yang aktif dalam mendukung program bangga kencana	Kab Bojonegoro	100%	7,065,368,700	Pendayagunaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab Bojonegoro	Persentase kader yang aktif dalam mendukung program bangga kencana	100%	7,065,368,700	
2.14.03.2.02 .0005	Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab Bojonegoro	1 Organisasi	18,791,700	Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab Bojonegoro	Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh	1 Organisasi	18,791,700	

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

		di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						PKB/PLKB			
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti pergerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab Bojonegoro	3226 Orang	6,422,640,000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab Bojonegoro	Jumlah kader yang mengikuti pergerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3226 Orang	6,422,640,000	
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab Bojonegoro	12 Laporan	623,937,000	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	623,937,000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dan jaringannya yang memberikan pelayanan KBKR sesuai standarisasi pelayanan	Kab Bojonegoro	65.00%	1,955,757,143	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bojonegoro	Persentase faskes dan jaringannya yang memberikan pelayanan KBKR sesuai standarisasi pelayanan	65.00%	1,955,757,143	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab Bojonegoro	66 Laporan	40,200,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	66 Laporan	40,200,000	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	Kab Bojonegoro	2568 Orang	1,670,644,693	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kab Bojonegoro	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	2568 Orang	1,670,644,693	

2.14.03.2.03 .0006	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	Kab Bojonegoro	12 Unit	199,581,350	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Kab Bojonegoro	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	12 unit	199,581,350	
2.14.03.2.03 .0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejeringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejeringnya	Kab Bojonegoro	-	-	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejeringnya	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejeringnya	-	-	
2.14.03.2.03 .0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah laporan dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	Kab Bojonegoro	10 Laporan	45,331,100	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan dukungan operasional pelayanan KB Bergerak	10 Laporan	45,331,100	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Persentase Kampung KB yang Mandiri	Kab Bojonegoro	50%	996,250,000	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Kab Bojonegoro	Persentase Kampung KB yang Mandiri	50%	996,250,000	
2.14.03.2.04 .0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Kab Bojonegoro	4 Dokumen	3,750,000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab Bojonegoro	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	4 Dokumen	3,750,000	
2.14.03.2.04 .0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kab Bojonegoro	28 Kampung KB	992,500,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab Bojonegoro	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	28 Kampung KB	992,500,000	

2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang ikut kelompok bina ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kab Bojonegoro	79.50%	7,135,988,793	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab Bojonegoro	Persentase keluarga yang ikut kelompok bina ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga	79.50%	7,135,988,793	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah bina ketahanan yang aktif	Kab Bojonegoro	2127 kelompok	805,246,793	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab Bojonegoro	Jumlah bina ketahanan yang aktif	2127 kelompok	805,246,793	
2.14.04.2.01 .0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab Bojonegoro	6 Laporan	95,735,097	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan Keuangan Keluarga)	6 Laporan	95,735,097	
2.14.04.2.01 .0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab Bojonegoro	4 Laporan	259,200,000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	4 Laporan	259,200,000	
2.14.04.2.01 .0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembedayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Bojonegoro	2 Laporan	34,190,471	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembedayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	34,190,471	

2.14.04.2.01.0018	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembedayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Bojonegoro	20 Unit	300,000,000	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembedayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Bojonegoro	Jumlah Unit sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	300,000,000	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembedayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Bojonegoro	4 Laporan	116,121,225	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembedayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	116,121,225	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembedayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Bojonegoro	-	-	Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembedayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab Bojonegoro	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	
2.14.04.2.02	Kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok UPPKS yang aktif berusaha	Kab Bojonegoro	42%	6,330,742,000	Kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab Bojonegoro	Persentase kelompok UPPKS yang aktif berusaha	42%	6,330,742,000	

2.14.04.2.02 .0004	Promosi dan Sosialisasi program Ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Kab Bojonegoro	3 Laporan	18,142,000	Promosi dan Sosialisasi program Ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Kab Bojonegoro	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	3 Laporan	18,142,000	
2.14.04.2.02 .0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil, Pascasalin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)	Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting	Kab Bojonegoro	10 Laporan	3,006,000,000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil, Pascasalin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)	Kab Bojonegoro	Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting	10 Laporan	3,006,000,000	
2.14.04.2.02 .0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil, Pascasalin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan	Kab Bojonegoro	10 Laporan	3,306,600,000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS. Ibu Hamil, Pascasalin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)	Kab Bojonegoro	Jumlah keluarga berisiko stunting yang mendapat pendampingan	10 Laporan	3,306,600,000	
J U M L A H					32,753,733,756						32,753,733,756

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak ada Usulan program/ kegiatan dari pemangku kepentingan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD;

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro

Nama PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan
Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki tugas untuk melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Bangga Kencana merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat penting yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- a. Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan kegiatan prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dengan kegiatan prioritas kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan kegiatan prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi dan Percepatan perbaikan Gizi Masyarakat.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mendapatkan amanat dari Presiden RI sebagai koordinator dari percepatan penurunan stunting di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa Indonesia harus mencapai prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Namun pada saat ini angka stunting masih berada pada angka 27.7% (SSGBI

2019). Dalam Perpres tersebut juga disebutkan bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting telah ditetapkan 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dengan sasaran dan target sebagai berikut:

- a. Pilar 1; Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa;
- b. Pilar 2; Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pilar 3; Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitive di kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota dan pemerintah desa;
- d. Pilar 4; Peningkatan Ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
- e. Pilar 5; Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi

Hal ini merupakan Program Prioritas nasional yang diikuti dengan Program di tingkat provinsi yang dijabarkan dalam :

- a. Program Pembangunan Keluarga;
- b. Program Kependudukan; dan
- c. Program Keluarga Berencana (KB)

Sedangkan arah kebijakan dan strategi nasional Kemen PPPA yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yaitu :

- a. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dan kekerasan dan TPPO;
- c. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya.

Kebijakan yang dilakukan ditingkat Kabupaten yang terjabarkan dalam program dan kegiatan sudah mengacu pada kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi, hanya saja di Kabupaten harus disinkronkan sesuai kebutuhan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

A. Tujuan

Tujuan Program Pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah:

1. Meningkatkan kualitas Kesehatan melalui pengendalian struktur pendudukn menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pembangunan.

B. Sasaran

Sasaran program kerja yang akan dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN			SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
			2024	2025	2026			2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan melalui pengendalian struktur Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.31	0.31	0.30	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertlity Rate (TFR)	1.93	1.92	1.92
						Meningkatnya mCPR	Persentase mCPR	76.55%	76.57%	76.59%
						Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmetneed</i>)	Persentase Unmetnned	6.6%	6.5%	6.5%
2	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57.50	57.75	58.00	Meningkatnya Komitmen Pembangunan Responsif Gender	Persentase anggaran responsif gender	52.55%	52.59%	52.62%
						Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5.3	5.2	4.9
						Meningkatnya kepala rumah tangga Perempuan yang memiliki usaha	Persentase kepala rumah tangga Perempuan yang memiliki usaha	70.00	70.50	70.55
3	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 1.000 anak	0.09	0.08	0.07	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100	100	100
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Dinas P3AKB	A (82%)	A (83%)	A (84%)	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Dinas P3AKB	A (82%)	A (83%)	A (84%)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas P3AKB	3.33	3.34	3.35		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas P3AKB	3.33	3.34	3.35

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2024 terdiri 10 program, 26 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.32,753,733,756 Adapun rincian sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
dan Pendanaan
Tahun 2024

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah	Lokasi	Pendanaan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			Rp. 13,280,003,180
	Jumlah Program	7	Kab Bojonegoro	
	Jumlah Kegiatan	18	Kab Bojonegoro	
	Jumlah Sub Kegiatan	39	Kab. Bojonegoro	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Rp. 19,473,730,576
	Jumlah Program	3	Kab Bojonegoro	
	Jumlah Kegiatan	8	Kab Bojonegoro	
	Jumlah Sub Kegiatan	29	Kab Bojonegoro	
Total Anggaran				Rp. 32,753,733,756

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

Berikut capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama tahun 2022 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022
1	Meningkatnya komitmen pembangunan responsif gender	Persentase anggaran responsif gender	52.50%	44.34%
2	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3.45	2.23
3	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 1.000 anak	0.11	0.10
4	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate	1.94	1.94
5	Meningkatnya mCPR	Persentase mCPR	76.76%	77.10%
6	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persentase Unmetneed	6,80%	6.77%
7	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Predikat SAKIP Dinas P3AKB	80% A	72.66 (BB)
		Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan oleh Dinas	3.30 dari skala 4	3.43 dari skala 4
		Persentase Penyerapan Anggaran Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro	90.00%	86.39%
		Inovasi	1	1

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya komitmen pembangunan responsif gender dengan indikator Persentase anggaran responsif gender dengan realisasi sebesar 44.34% menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 75.20% menurun sebesar 30.86%
- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dengan indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) dengan realisasi sebesar 2.24 di tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,25.
- c. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak dengan indikator Rasio kekerasan terhadap anak per 1.000 anak dengan realisasi 0.10 di tahun 2022, hal ini sebanding dengan realisasi di tahun 2021 yaitu sebesar 0.10.
- d. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dengan indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR) dengan realisasi sebesar 1.94 menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 1.98, sehingga menurun sebesar 0.04.
- e. Meningkatnya mCPR dengan indikator persentase mCPR dengan realisasi sebesar 77.10% di tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 77.39%, sehingga dapat dikatakan persentase mCPR sebesar 0.29 persen.
- f. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) dengan indikator Persentase Unmetneed sebesar 6.77% di tahun 2022 menurun jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 8,46%. Sehingga dapat dikatakan persentase Unmetneed sebesar 1.69 persen.

Berdasarkan hasil capaian kinerja utama di tahun 2022 berikut akan dijabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kinerja dari sasaran di perangkat daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Perangkat Daerah Dinas P3AKB Tahun 2024

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Program: Pengendalian Penduduk
		Kegiatan: Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

		Sub Kegiatan: Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal
		Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan: Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
		Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
		Sub Kegiatan: Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		Sub Kegiatan: Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Pelayanan KB
2	Meningkatnya mCPR	Program: Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Sub Kegiatan: Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
		Sub Kegiatan: Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Sub Kegiatan: Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),

		Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
		Sub Kegiatan: Pengendalian Program KKBPK
		Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		Sub Kegiatan: Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
		Sub Kegiatan: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
		Kegiatan: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
		Sub Kegiatan: Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmetneed</i>)	Program: Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Kegiatan: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

		Sub Kegiatan: Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		Sub Kegiatan: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
		Sub Kegiatan: Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
		Program: Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Sub Kegiatan: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
		Sub Kegiatan: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
		Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,

		BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
		Sub Kegiatan: Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
		Kegiatan: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Sub Kegiatan: Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
		Sub Kegiatan: Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)
		Sub Kegiatan: Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)
4	Meningkatnya komitmen pembangunan responsif gender	Program: Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Kegiatan: Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

		Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		Sub Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Program: Peningkatan Kualitas Keluarga
		Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program: Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program: Perlindungan Perempuan
		Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Program: Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

		Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan: Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan: Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Sub Kegiatan:

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD
		Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Kegiatan:

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel
		Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merencanakan 10 Program dengan 26 kegiatan dan 68 sub kegiatan untuk tahun 2024, meliputi:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (8 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan) yaitu:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5 sub kegiatan)
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6 sub kegiatan)
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1 sub kegiatan)
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1 sub kegiatan)
 - a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah (3 sub kegiatan)
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2 sub kegiatan)
 - a. Pengadaan Mebel

- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2 sub kegiatan)
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 sub kegiatan)
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (2 kegiatan dan 4 sub kegiatan) yaitu:
 - 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (3 sub kegiatan)
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - c. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- III. Program Perlindungan Perempuan (3 kegiatan dan 3 sub kegiatan) yaitu:
 - 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (1 sub kegiatan)
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota (1 sub kegiatan)

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1 sub kegiatan)
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- IV. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (1 kegiatan dan 1 sub kegiatan) yaitu:
 - 1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1 sub kegiatan)
 - a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- V. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (1 kegiatan dan 1 sub kegiatan) yaitu:
 - 1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1 sub kegiatan)
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- VI. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (2 kegiatan dan 6 sub kegiatan) yaitu:
 - 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (1 sub kegiatan)
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (4 sub kegiatan)
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- VII. Program Perlindungan Khusus Anak (1 kegiatan dan 1 sub kegiatan) yaitu:
- 1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1 sub kegiatan)
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- VIII. Program Pengendalian Penduduk (2 kegiatan dan 6 sub kegiatan) yaitu:
- 1. Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (1 sub kegiatan)
 - a. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jaluar Pendidikan Formal dan Nonformal
 - 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (4 sub kegiatan)
 - a. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
 - b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- IX. Program Keluarga Berencana (4 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan) yaitu:
- 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal (6 sub kegiatan)
 - a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - c. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

- f. Pengendalian Program KKBPK
- 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) (3 sub kegiatan)
 - a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
 - b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota (4 Sub Kegiatan)
 - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB (2 sub kegiatan)
 - a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 - b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- X. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (2 kegiatan dan 8 sub kegiatan) yaitu:
 - 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (5 sub kegiatan)
 - a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
 - b. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
 - c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

- d. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - e. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (3 sub kegiatan)
- a. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
 - b. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)
 - c. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/Balita)

Untuk lebih terperinci rumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS P3AKB
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
																		Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana							33.003.075.217,00	32.375.646.535,00	32.753.733.756,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							33.003.075.217,00	32.375.646.535,00	32.753.733.756,00				
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							13.668.324.641,00	12.951.915.959,00	13.280.003.180,00				
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata- rata capaian kegiatan penunjang pemerintahan daerah				100 %	100 %	9.329.444.592,00	8.462.625.910,00	7.956.246.643,00				
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan koordinasi dan penyajian dokumen laporan kinerja	-			100 %	100 %	143.771.045,00	143.655.045,00	143.655.045,00			-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	14.672.400,00	14.556.400,00	14.556.400,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	104.341.045,00	104.341.045,00	154.341.045,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	-			5 Layanan	5 Layanan	6.730.585.205,00	5.839.957.523,00	5.839.957.523,00			-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				16 Laporan	16 Laporan	6.078.800,00	6.078.800,00	6.078.800,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	3.885.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	6.260.450,00	6.260.450,00	6.260.450,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa

	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset tetap dan tidak tetap milik daerah teradministrasi dengan baik	-			100 %	100 %	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00			-	4. Peningkatan kepeduliaan dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepeduliaan dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja pegawai	-			100 %	100 %	39.140.000,00	39.140.000,00	39.140.000,00			-	4. Peningkatan kepeduliaan dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapora n	12 Lapora n	174.701.846,00	174.701.846,00	176.701.846,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kepedulia n dan keberpih akan bagi perempu an, anak, penyand ang disabilita s serta kaum dhuafa
	2	0 8	0 1	2.0 8	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				56 Lapora n	56 Lapora n	1.655.340.168,00	1.679.265.168,00	1.621.324.579,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumny a Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kepedulia n dan keberpih akan bagi perempu an, anak, penyand ang disabilita s serta kaum dhuafa
	2	0 8	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang penunjang milik daerah dilakukan pemeliharaan	-		100 %	100 %	217.948.500,00	217.948.500,00	217.948.500,00			-	4. Peningka tan kepedulia n dan keberpih akan bagi perempu an, anak, penyand ang disabilita s serta kaum dhuafa
	2	0 8	0 1	2.0 9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

[illegible]

						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Perangkat Daerah	120 Perangkat Daerah	27.174.900,00	27.174.900,00	27.174.900,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa	
	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG													
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Perangkat Daerah	120 Perangkat Daerah	122.340.644,00	122.340.644,00	289.971.294,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa	
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan rentan yang aktif berusaha dalam meningkatkan kualitas keluarga	-			56.50 %	56.50 %	43.599.180,00	43.599.180,00	43.599.180,00			-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	43.599.180,00	43.599.180,00	100.599.180,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
3	2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif			100 %	100 %	2.824.272.800,00	2.974.682.800,00	3.513.833.050,00				
	2	08	03	2.01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan	-		100 %	100 %	40.349.500,00	190.759.500,00	190.759.500,00			-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan				13 Dokumen	13 Dokumen	40.349.500,00	190.759.500,00	729.909.750,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

							Kabupaten/Kota												kaum dhuafa
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan kasus rujukan yang ditangani terhadap perempuan korban kekerasan	-			100 %	100 %	24.673.300,00	24.673.300,00	24.673.300,00			-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				35 Orang	35 Orang	24.673.300,00	24.673.300,00	24.673.300,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa	

	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif dalam penanganan perempuan korban kekerasan	-			100 %	100 %	2.759.250.000,00	2.759.250.000,00	2.759.250.000,00			-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				1475 Orang	1475 Orang	2.759.250.000,00	2.759.250.000,00	2.759.250.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
4	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kepala rumah tangga perempuan rentan yang memiliki keterampilan usaha				70.55 %	70.55 %	135.165.740,00	135.165.740,00	135.165.740,00				
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan rentan yang aktif berusaha dalam meningkatkan kualitas keluarga	-			50.50 %	50.50 %	135.165.740,00	135.165.740,00	135.165.740,00			-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

																		s serta kaum dhuafa	
	2	0 8	0 4	2.0 1	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokum en	6 Dokum en	135.165.740,00	135.165.740,00	135.165.740,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	-	4. Peningka tan kepedulia n dan keberpih akan bagi perempu an, anak, penyand ang disabilita s serta kaum dhuafa
5	2	0 8	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang terpenuhi sesuai standar				75.5 %	75.5 %	50.208.912,00	50.208.912,00	92.926.200,00				
	2	0 8	0 5	2.0 1		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data gender dan anak	-			75.50 %	75.50 %	50.208.912,00	50.208.912,00	50.208.912,00			-	4. Peningka tan kepedulia n dan keberpih akan bagi perempu an, anak, penyand ang disabilita s serta kaum dhuafa
	2	0 8	0 5	2.0 1	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota													

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	154.966.293,00	154.966.293,00	150.486.293,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
7	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif				100 %	100 %	37.024.150,00	37.024.150,00	37.024.150,00				
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	-			100 %	100 %	37.024.150,00	37.024.150,00	37.024.150,00			-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				35 Orang	35 Orang	37.024.150,00	37.024.150,00	37.024.150,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	4. Peningkatan kepedulian dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

																		dhuafa	
	2	1 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						19.334.750.576,00	19.423.730.576,00	19.473.730.576,00					
8	2	1 4	0 2			PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK	Persentase desa dan institusi pendidikan formal/ non formal siaga kependudukan aktif dalam kegiatan pengendalian penduduk				100 %	100 %	1.005.094.700,00	671.294.700,00	671.294.700,00				
	2	1 4	0 2	2.0 1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah institusi pendidikan formal/ non formal siaga kependudukan yang terbentuk	-			2 Sekola h	2 Sekola h	11.530.000,00	11.530.000,00	11.530.000,00			-	3. Peningka tan kualitas pendidika n, kesehata n untuk menduku ng SDM yang berkelanj utan
	2	1 4	0 2	2.0 1	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal													
						Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal					2 Kegiat an	2 Kegiata n	11.530.000,00	11.530.000,00	11.530.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	-	3. Peningka tan kualitas pendidika n, kesehata n untuk menduku ng SDM yang berkelanj utan

	2 4	1 0 3	2.0 1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kegiatan KIE yang dilaksanakan sesuai standar	-				76.00 %	76.00 %	1.526.051.240,00	1.546.151.240,00	1.546.151.240,00			-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2 4	1 0 3	2.0 1	0008	Pengendalian Program KKBPBPK														
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPBPK					2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2 4	1 0 3	2.0 1	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					5 Laporan	5 Laporan	743.400.000,00	617.500.000,00	617.500.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2 4	1 0 3	2.0 1	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				5 Laporan	5 Laporan	430.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang												
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal												
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang				4 Dokumen	4 Dokumen	33.651.240,00	33.651.240,00	86.571.240,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	1 Organisasi	18.791.700,00	18.791.700,00	18.791.700,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan	
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				-	12 Laporan	0,00	623.937.000,00	623.937.000,00	Kab. Bojonegoro , Ngraho, Kalirejo Kab. Bojonegoro , Kanor, Sumberwangi Kab. Bojonegoro , Purwosari, Purwosari Kab. Bojonegoro , Gayam, Gayam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	-	-	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes dan jaringannya yang memberikan pelayanan KBKR sesuai standarisasi pelayanan	-			65.00 %	65.00 %	2.557.764.143,00	1.955.757.143,00	1.955.757.143,00			-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	0 Laporan	31.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	1 4	0 3	2.0 3	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak													
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				10 Laporan	10 Laporan	40.171.100,00	45.331.100,00	45.331.100,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	1 4	0 3	2.0 4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang Mandiri	-			50.00 %	50.00 %	985.500.000,00	996.250.000,00	996.250.000,00			-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	1 4	0 3	2.0 4	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													

							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				28 Kampung	28 Kampung	976.500.000,00	992.500.000,00	1.042.500.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
10	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang ikut kelompok bina ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga				79.5 %	79.5 %	7.195.988.793,00	7.135.988.793,00	7.135.988.793,00				
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bina ketahanan keluarga yang aktif	-			2127 Kelompok	2127 Kelompok	7.177.846.793,00	805.246.793,00	805.246.793,00			-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)													

Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Tahun 2024

						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				6 Laporan	6 Laporan	95.735.097,00	95.735.097,00	95.735.097,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)												
						Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	4 Laporan / Dokumen	0,00	259.200.000,00	259.200.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))												
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	2 Laporan	34.190.471,00	34.190.471,00	34.190.471,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))												

							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	25 Unit	360.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				4 Laporan	4 Laporan	116.121.225,00	116.121.225,00	116.121.225,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional				3006 Orang	0 Orang	6.571.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	-	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan

							kegiatan												
	2	1	0	2.0		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok UPPKS yang aktif berusaha	-			42.00 %	42.00 %	18.142.000,00	6.330.742.000,00	6.330.742.000,00			-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	1	0	2.0	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja													
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				3 Laporan	3 Laporan	18.142.000,00	18.142.000,00	18.142.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk mendukung SDM yang berkelanjutan
	2	1	0	2.0	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	-	0,00	3.006.000.000,00	3.006.000.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-
	2	1	0	2.0	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													

							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	-	0,00	3.306.600.000,00	3.306.600.000,00	Kab. Bojonegoro , Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	-
	J U M L A H													33.003.075.217,00	32.375.646.535,00	32.753.733.756,00			

BAB IV

P E N U T U P

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Penetapan Perubahan Renja 2024 1) Masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai pada tahun 2022; 2) masih rendahnya persentase anggaran responsif gender di tahun 2022

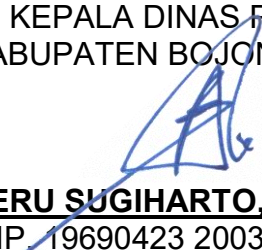
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 disusun setiap 1 (satu) tahun yang bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan dan menjadi bahan evaluasi ketercapaian indikator kinerja pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dalam rangka penilaian tingkat keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Strategis Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro, diperlukan kerangka pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta indikator kinerja kegiatan maupun indikator pencapaian sasaran realistis dan akuntabel. Pengukuran kinerja mencakup rencana tingkat capaian tahun berjalan dari masing-masing indikator kinerja program/kegiatan dan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah di rencanakan pada tahun 2024, kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023.

Dokumen Penetapan Perubahan Renja Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 diharapkan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perubahan/DPA Perubahan 2024 yang merupakan pedoman pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan bagi seluruh jajaran Dinas P3AKB.

Bojonegoro, 30 Juli 2024

KEPALA DINAS P3AKB
KABUPATEN BOJONEGORO


HERU SUGIHARTO, SE. MM.
NIP. 19690423 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. PATTIMURA NO. 01 TELP. (0353) 892019 Fax . 889515
E-mail: dpppakbbojonegoro@gmail.com
BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR: 188/4137/412.209/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro No 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023; dan
14. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/531/KEP/412.013/2021 Tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DINAS P3AKB KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2024;
 - b. Menyempurnakan Rancangan Renja Tahun 2024 berdasar Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - d. Menyusun Rancangan Renja Tahun 2024;
 - e. Menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : Desember 2022

KEPALA DINAS P3AKB
KABUPATEN BOJONEGORO



HERU SUGIHARTO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690423 200312 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P3AKB
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 188/4137/KEP/412.213/2022
Tanggal : Desember 2022

**TIM PENYUSUN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024**

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam kedinasan
1	Pengarah	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro
2	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro
3	Sekretaris	Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro
4	Anggota	a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Bina Lini Lapangan; b. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; c. Kepala Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak; d. Kasubag Umum dan Kepegawaian; e. Kasubag Keuangan; f. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda Advokasi dan KIE; g. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda Pendayagunaan Petugas Lini Lapangan; h. Sub Koordinator Pranata Komputer Ahli Muda Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi; i. Sub Koordinator Penyuluh KB Ahli Muda Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; j. Sub Koordinator Penyuluh KB Ahli Madya Ketahanan Balita, Anak dan Lansia serta Pemberdayaan Keluarga; k. Sub Koordinator Penyuluh KB Ahli Muda Ketahanan Remaja l. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda Pengarusutamaan Gender m. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda Pengarusutamaan Hak Anak; dan n. Sub Koordinator Penyuluh Sosial Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak.


KEPALA DINAS P3AKB
KABUPATEN BOJONEGORO
HERU SUGIHARTO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690423 200312 1 003